

PELAKSANAAN PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

Rino Tritana¹

Abstrak

Jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) di Kota Samarinda dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan program Raskin tersebut. Dengan fokus penelitian, pelaksanaan penyaluran Raskin dari titik distribusi ke titik beras, penyaluran beras miskin dari titik distribusi ke titik beras, pembayaran harga beras Raskin (HTR).

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data atau Key Informan adalah Lurah Lok Bahu Kota Samarinda dan Masyarakat yang di tunjuk oleh Rukun Tetangga yang menerima Raskin. Dari hasil penelitian lapangan, data-data diolah dan dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Penentuan penerima beras dilakukan penghitungan oleh aparat Badan Pusat Statistik dan kelurahan setempat serta dilakukan rapat koordinasi dengan Rukun Tetangga, dan proses pembayaran dilakukan dengan cara tunai dan mencicil sesuai dengan kemampuan ekonomi penerima beras. Selanjutnya dalam mekanisme penerimaan beras belum dilakukan sesuai dengan peraturan karena data di lapangan didapatkan bahwa jatah beras dibagikan sekaligus untuk jatah 3 bulan dan didapati keterlambatan pembagiannya dan keterlambatan kedatangan beras.

Dari analisis tersebut maka disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Lok Bahu Kota Samarinda belum dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, serta belum maksimal karena masih terdapat keterlambatan kedatangan dan jadwal pembagian jatah beras miskin, dimana pada tahun 2013 kedatangan beras pada bulan Desember dan dilakukan pembagian jatah beras sekaligus untuk jatah 3 bulan.

Kata Kunci : Raskin

PENDAHULUAN

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusional bagi pencapaian tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea empat, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini

¹Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : rinotritana11@gmail.com

juga termasuk dalam UUD 45' pada pasal 33 ayat (3) yaitu, bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan diperkuat pada pasal 34 UUD 45', bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu *Universal Declaration of Human Right* (1948:48), *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996*, *Millennium Development Goals* (MDGs). Bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah mentargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Program Raskin sangat strategis dan menjadi program nasional yang dikelola secara lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal. Seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, baik di pusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program Raskin, yang diwujudkan dalam 6 Tepat.

Berdasarkan dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan dengan judul "Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) Di Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang".

Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda ?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi didalam Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor dalam pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori dalam suatu penelitian sangat penting. Dikatakan oleh Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (199:37), "bahwa teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstrak, definisi dan proposisi untuk menerapkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep".

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sugiyono (2003:55) bahwa teori adalah seperangkat asumsi dan generalisasi yang dapat di gunakan untuk mengungkapkan, menjelaskan, dan memprediksi perilaku yang dimiliki keteraturan.

Menurut Usman dan Akbar (2003:8), "menyatakan bahwa konsep dipakai oleh peneliti untuk menggambarkan abstraksi suatu gejala sosial atau gejala alamiah".

Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Lok Bahu (Rino Tri Tana)
Konsep juga dapat disebut sebagai generalisasi dari sekelompok gejala tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai gejala yang sama.

Definisi teori menurut Soekamto (2002 :58) adalah hubungan antara dua fakta atau lebih yang dibuktikan akan kebenarannya atau pengaturan akan fakta menurut cara-cara tertentu, yaitu cara ilmiah. Sedangkan konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Perbedaan teori dan konsep yaitu konsep dalam hal ini masih belum terbukti kebenarannya dan banyak digunakan oleh para ahli dalam menggambarkan fenomena-fenomena sosial dan alamiah yang terus berubah sepanjang waktu.

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa teori dan konsep sangat dibutuhkan sebagai pegangan pokok secara umum dan dijadikan sebagai acuan untuk menyederhanakan arti kata atau pemikiran tentang ide-ide maupun gejala sosial sehingga orang lain dapat segera memahami maksudnya.

Teori adalah unsur penelitian yang paling besar peranannya dalam penelitian yaitu selain landasan yang dijadikan sebagai pedoman dalam membahas suatu masalah juga sebagai unsur penting dalam mencari hubungan sebab-akibat beberapa variabel dalam suatu penelitian. Proses identifikasi dan pemilihan kerangka dasar penelitian akan menjadi mudah jikaterlebih dahulu kita melakukan tinjauan terhadap konteksnya secara teoritis. Ini sangat perlu mengingat gambaran konteks ini tidak hanya penting untuk menyusun dasar penelitian yang paling tepat dalam menerapkan acuan teori yang paling sesuai tetapi dengan mempelajari konteks terlebih dulu memungkinkan penulisan lebih mudah dalam menerapkan landasan dalam pemikiran yang paling sesuai.

Pelayanan Publik

Menurut Fred Luthants (1995:38) Pelayanan adalah sebagai sebuah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang menyangkut segala usaha yang dilakukan orang lain dalam mencapai tujuannya. Zeitaml (1996 : 41) Pelayanan adalah penyampaian secara *excellent* atau superior dibandingkan dengan harapan konsumen.

Menurut Anton Adiwiyato (1997:74) Pelayanan adalah suatu yang sangat subjektif dan suli didefinisikan. Ini karena pelayanan sebagai subjek yang melakukan suatu transaksi dapat bereaksi secara terhadap sesuatu yang kelihatannya seperti pelayanan yang sama.

Kebijakan Publik

Menurut Heclo (1972:61) Kebijakan adalah sebagai rangkaian tindakan pemerintahan atau tidak bertindaknya pemerintah atas sesuatu masalah. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai *decision making* yaitu apa yang dipilih oleh pemerintah untuk mengatasi suatu masalah publik, baik dengan cara melakukan suatu tindakan maupun untuk tidak suatu tindakan.

Menurut Syafie (1992:39) Kebijakan adalah tugas intelektual pembuatan keputusan meliputi penjelasan tujuan, penguraian kecenderungan, penganalisaan keadaan, proyeksi pengembangan masa depan dan penelitian, penilaian dan penelitian, serta penilaian dan pemilihan kemungkinan.

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah permasalahan yang sifatnya *multidimensional*. Pendekatan dengan satu bidang ilmu tertentu tidaklah mencukupi untuk mengurai makna dan fenomena yang menyertainya. Definisi secara umum yang lazim dipakai dalam perhitungan dan kajian-kajian akademik adalah pengertian kemiskinan yang diperkenalkan oleh Bank Dunia yaitu sebagai ketidakmampuan mencapai standar hidup minimum.

Friedman (dalam Usman, 2006:43) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial. Basis kekuatan sosial tidak terbatas hanya pada (1) modal produktif atau aset (misalnya organisasi sosial politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, partai politik, sindikasi, koperasi dan lain-lain), tetapi juga pada (2) *net work* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang dan lainlain; (3) pengetahuan dan ketrampilan yang memadai; dan (4) informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan mereka.

Scott dalam (Usman, 2006:43) menerangkan bahwa kemiskinan setidaknya memiliki kondisi- kondisi yang pada umumnya didekati (1) dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non material yang diterima oleh seseorang sehingga secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk atau kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat; (2) kadang-kadang didefinisikan dari segi kepemilikan aset yakni tanah, rumah, peralatan, uang, emas, kredit dan lain-lain; (3) kemiskinan non-materi meliputi berbagai macam kebebasan, hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, hak atas rumah tangga dan kehidupan yang layak.

Menurut Suparlan (1995:53) kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Djojohadikusumo (1994) kemiskinan muncul sebagai akibat kesenjangan yang mengandung dimensi ekonomis sosiologis dan berdimensi ekonomi regional. Kemiskinan ini terjadi sebagai akibat adanya ketimpangan kekuatan yang sangat mencolok diantara golongan-golongan pelaku ekonomi, dimana pengusaha besar cenderung mengandalkan kekuatan sumberdayanya untuk merebut suatu kedudukan di pasar barang dan jasa. Selain dari dimensi ekonomi dan non ekonomi, kemiskinan juga dapat disebabkan oleh dimensi geografis, sebuah rumah tangga miskin diwilayah yang mendukung dapat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk keluar dari kemiskinan, sementara rumah tangga miskin yang berada pada wilayah yang tidak mendukung, cenderung menjadi stagnan dan bahkan menjadi sangat miskin.

Menurut para ahli seperti Andre Bayo Ala (1981:51), kemiskinan sangat multidimensional, artinya kemiskinan mempunyai banyak aspek sebab kebutuhan setiap manusia sangat beragam. Kemiskinan ditinjau dari sisi kebijakan umum terdiri dari dua aspek, yaitu primer dan sekunder. Aspek primer merupakan miskin akan aset, organisasi sosial politik, serta pengetahuan dan keterampilan. Aspek sekunder merupakan miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi.

Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Lok Bahu (Rino Tri Tana)
Manifestasi dari dimensi kemiskinan ini dalam bentuk kekurangan gizi, air bersih, perumahan yang tidak sehat, pelayanan kesehatan yang kurang memadai dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Dimensi-dimensi kemiskinan ini saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berarti bahwa kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek akan menyebabkan kemunduran atau kemajuan aspek lainnya. Sebenarnya inti dari kemiskinan adalah manusianya, baik secara individual maupun secara kolektif. Seperti istilah kemiskinan pedesaan atau kemiskinan perkotaan yang miskin bukan daerah perkotaan atau desanya, tetapi yang mengalami kemiskinan adalah penduduk wilayah tersebut.

Pengertian Kemiskinan

Masalah kemiskinan banyak dikaji oleh para ahli dari berbagai aspek dan dari berbagai disiplin ilmu dengan menggunakan bermacam-macam ukuran dan konsep. Para ekonom membahas kemiskinan dengan menggunakan istilah standar hidup, pendapatan, dan distribusi pendapatan. Para sosiolog megkajinya dengan menggunakan istilah kelas, stratifikasi, dan marjinalitas. Sedangkan, para pemerhati masalah-masalah sosial lebih memperhatikan konsep tingkat hidup yakni melihat tingkat pendapatan, masalah pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kondisi sosial masyarakat secara umum. Namun, sampai saat ini belum ada definisi yang baku tentang kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan itu sangat kompleks dan pemecahannya tidak mudah.

Menurut para ahli seperti Andre Bayo Ala (1981:51), kemiskinan sangat multidimensional, artinya kemiskinan mempunyai banyak aspek sebab kebutuhan setiap manusia sangat beragam. Kemiskinan ditinjau dari sisi kebijakan umum terdiri dari dua aspek, yaitu primer dan sekunder. Aspek primer merupakan miskin akan aset, organisasi sosial politik, serta pengetahuan dan keterampilan. Aspek sekunder merupakan miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Manifestasi dari dimensi kemiskinan ini dalam bentuk kekurangan gizi, air bersih, perumahan yang tidak sehat, pelayanan kesehatan yang kurang memadai dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.

Aspek-Aspek Kemiskinan

Masalah kemiskinan meliputi tiga aspek, yaitu penyebab pokok kemiskinan, ukuran kemiskinan, dan indikator kemiskinan yang akan dibahas berikut ini :

1. Penyebab Pokok Kemiskinan

Sebenarnya para pembuat kebijakan pembangunan di negara sedang berkembang mengharapkan bahwa sumber daya yang ada di negara tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, ditambah lagi dengan ciri dan kondisi masyarakat yang sangat beragam maka kebijaksanaan nasional umumnya diarahkan untuk memecahkan permasalahan jangka pendek dan masih kurang dapat mengatasi permasalahan kelompok ekonomi tingkat bawah (Mukhopadhyay, 1985:28). Selain itu kebijakan pembangunan di negara sedang berkembang secara tidak langsung sangat bergantung pada kondisi luar negeri, sebab modal pembangunan masih berasal dari negara lain (Frederick, 1985:48).

2. Ukuran Kemiskinan

Dimensi kemiskinan sangat luas sehingga sangat sulit untuk mengukurnya. Namun pada umumnya para pakar menggunakan ukuran kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah konsep yang dikaitkan dengan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan orang dapat hidup layak. Atau dapat dikatakan bahwa tingkat hidup seseorang tidak memungkinkan untuk bisa memenuhi keperluan-keperluannya yang mendasar sehingga kesehatannya baik fisik maupun mental terganggu.

3. Indikator Kemiskinan

Ada bermacam-macam indikator kemiskinan yang digunakan di Indonesia seperti konsumsi beras per kapita per tahun, tingkat pendapatan, dan tingkat kesejahteraan.

a. Tingkat Konsumsi Beras

Sayogyo (1977) menggunakan indikator ini dengan melihat tingkat konsumsi beras per kapita per tahun. Secara lebih rinci Sayogyo membagi indikator kemiskinan tersebut menjadi tiga kelompok .

b. Tingkat Pendapatan

Indikator ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang melihat besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimumnya.

c. Tingkat Kesejahteraan

Menurut publikasi *United Nation (1961)* indikator kesejahteraan ini dilihat dari 9 komponen, yaitu kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi, dan kebebasan. Namun, yang sering digunakan hanya empat komponen, yaitu kesehatan, konsumsi gizi, perumahan dan pendidikan, sedangkan indikator yang lainnya sulit diukur dan sulit dibandingkan antar daerah atau antar waktu.

Mekanisme Pelaksanaan Raskin

Didalam pedoman umum Raskin 2014 ada beberapa kegiatan perencanaan dan pelaksanaan Raskin yang meliputi pelaksanaan penyaluran Raskin dari titik distribusi (TD) ke titik bagi (TB), penyaluran beras miskin dari titik bagi ke rumah tangga sasaran-penerima manfaat (RTS-PM), pembayaran harga tebus beras Raskin (HTR) berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah desa/kelurahan dan rencana pendistribusian Raskin.

- a. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari titik distribusi ke titik bagi
- b. Penyaluran beras Raskin dari titik beras ke rumah tangga sasaran-penerima manfaat
- c. Pembayaran harga tebus beras Raskin (HTR)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka jenis penelitian ini bersifat diskriptif penelitian. Deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberi gambaran serta penjelasan dari variabel yang di teliti, dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan program beras miskin (raskin) diKelurahan Lok Bahu Kota Samarinda.

Lokasi Penelitian

Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Lok Bahu (Rino Tri Tana)
Lokasi Penelitian dilakukan pada Kantor Kelurahan Lok Bahu Samarinda, Jl.M. Said, Samarinda Kalimantan Timur.

Fokus Penelitian

1. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan program raskin, yaitu :
 - a. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari titik distribusi ke titik beras.
 - b. Penyaluran beras miskin dari titik beras ke rumah tangga sasaran-penerima manfaat.
 - c. Pembayaran harga tebus beras Raskin (HTR).
2. Kendala/hambatan dalam proses Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) Di Kelurahan Lok Bahu Kota Samarinda.

Sumber Data

Dalam penelitian ini narasumber dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *aksidental sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Dalam teknik ini yang dipandang *key informan* adalah Lurah Kelurahan Loa Bahu Kota Samarinda dan *informan* lainnya adalah pegawai Kelurahan Loa bahu Kota Samarinda.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)
2. Penelitian lapangan (*Field Work Research*)
 - a. Observasi
 - b. Wawancara

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman :

1. Pengumpulan Data
2. Penyederhanaan Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan

Hasil Penelitian

Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan di dapatkan data bahwa untuk melakukan pelaksanaan penyaluran Raskin dari titik distribusi ke titik bagi yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah dan perum Bulog sebagai tim pelaksana distribusi Raskin yang mengecek kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh perum Bulog ke titik distribusi.

Penyaluran Beras Miskin dari Titik Beras ke Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat

Berdasarkan wawancara di lapangan dapat di simpulkan bahwa penyaluran beras Raskin sudah tepat sasaran kepada warga penerima manfaat yang dilakukan dalam

jangka waktu 1 bulan sekali sebanyak 15Kg/KK yang sudah terdaftar dalam buku agenda realisasi penjualan Raskin kepada warga penerima manfaat yang mendapatkan jatah beras Raskin.

Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa warga yang menerima beras miskin bertanggung jawab terhadap pembayaran beras miskin, mereka menyimpan sebagian pendapatan sehari-hari untuk membeli beras miskin dirumah RT setempat serta menunjukkan surat keterangan rumah tangga miskin.

Kendala/hambatan Dalam Proses Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) diKelurahan Lok Bahu Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pendataan penerima Raskin dapat disimpulkan bahwa pendataan dilakukan oleh ketua RT yang bekerja sama dengan PLKB. Pendataan tidak dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah warganya tetapi hanya dengan melihat kartu keluarga saja. Hal ini dapat mengakibatkan daftar penerima manfaat Raskin kurang tepat sasaran.

PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Beras Miskin (Raskin)

Didalam Pedoman Raskin tahun 2014, pelaksanaan penyaluran beras miskin (Raskin) di Kelurahan Lok Bahu diteliti melalui Pelaksanaan penyaluran Raskin dari titik distribusi ke titik bagi, Penyaluran beras Raskin dari titik bagi ke RTS-PM, Pembayaran harga tebus beras Raskin (HTR).

Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi

Didalam Pedoman Umum Raskin 2014 pelaksanaan penyaluran Raskin dari titik distribusi (TD) ke titik bagi (TB) adalah penyaluran Raskin dari titik distribusi sampai ke titik bagi menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten - kota. Hal ini agar semua RTS-PM bisa memperoleh Raskin dengan harga tebus yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu Rp1.600 per kilogram. Harga tebus Rp1.600 itu apabila masyarakat membeli di titik distribusi dan dana pendamping yang diminta dari daerah itu untuk biaya pengangkutan Raskin dari titik distribusi ke titik bagi untuk RTS-PM.

Penyaluran Beras Raskin dari Titik Bagi ke RTS-PM

Rumah tangga sasaran-penerima manfaat (RTS-PM) adalah rumah tangga yang berhak menerima beras dari program Raskin 2014 sesuai data yang diterbitkan dari basis data terpadu dikelola oleh tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K), yang sahkan oleh Kemenko Kesra RI dan data rumah tangga hasil pemuktahiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat. Kepesertaan RTS dalam program Raskin ditandai dengan kepemilikan KPS/SKRTM 2014, bagi rumah tangga hasil pemuktahiran DPM Raskin tahun 2014.

Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)

Pembayaran dapat melalui HTR dari RTS-PM kepada pelaksana distribusi Raskin dilakukan secara tunai. Pelaksana distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening perum Bulog melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada perum Bulog setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksana (jutlak)/petunjuk

Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Lok Bahu (Rino Tri Tana)
teknis (juknis) sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

Kendala/Hambatan Dalam Proses Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Lok Bahu Kota Samarinda.

Mengingat kompleksnya permasalahan program Raskin sehingga menimbulkan banyaknya kendala yang harus dihadapi yaitu yang berkaitan dengan keterlambatan datang beras, tambahan harga beras, pendataan keluarga penerima Raskin, serta yang tidak kalah pentingnya adalah adanya transparansi dalam pelaksanaan program beras Raskin.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun kesimpulan-kesimpulan dari skripsi ini yang berjudul Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan penyaluran beras miskin (Raskin) Didalam pedoman Raskin tahun 2014, pelaksanaan penyaluran beras miskin (Raskin) di Kelurahan Lok Bahu diteliti melalui Pelaksanaan penyaluran Raskin dari titik distribusi ke titik bagi, Penyaluran beras Raskin dari titik bagi ke RTS-PM, Pembayaran harga tebus beras Raskin (HTR).
 - a. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari titik distribusi ke titik bagi, penyaluran Raskin dari titik distribusi ke titik bagi dan rumah tangga sasaran-penerima manfaat (RTS-PM) dapat dilakukan secara regular oleh kelompok kerja (pokja), atau melalui warung desa, kelompok masyarakat dan padat karya Raskin. Hal ini yang bertanggungjawab pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
 - b. Penyaluran beras Raskin dari titik bagi ke rumah tangga sasaran-penerima (RTS-PM), pelaksanaan penyaluran Raskin dari titik bagi kepada RTS-PM dilakukan oleh pelaksana distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15Kg/RTS/bulan, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada tim koordinasi Raskin kabupaten/kota melalui tim koordinasi Raskin kecamatan. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
 - c. Pembayaran harga tebus beras Raskin (HTR),pembayaran HTR dari RTS-PM kepada pelaksana distribusi Raskin dilakukan secara tunai. Pelaksana distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Bulog melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada perum Bulog setempat. Pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksana (juklak)/petunjuk teknis (juknis) sesuai dengan situasi dan kondis setempat.
2. Kendala-Kendala yang dihadapi pada Kantor Kelurahan Lok Bahu Adalah :
Untuk mengetahui kendala/hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program beras miskin(Raskin) di Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda diantaranya keterlambatan beras datang, tambahan harga jual Raskin, pendataan keluarga penerima Raskin yang didata setiap ketua RT setempat yang diambil dari masyarakat yang ber perekonomian menengah kebawah yang berhak menerima jatah beras Raskin sesuai dengan daftar

realisasi penjualan Raskin yang diserahkan ke Kelurahan Lok Bahu yang didata lagi dalam proses pelaksanaan program Raskin dilaksanakan oleh pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakat dan mengurangi dampak kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat penerima Raskin.

Saran

Berdasarkan penelitian dan wawancara langsung dilapangan tentang pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin (Raskin) diKelurahan Lok Bahu Kotamadya Samarinda masih belum maksimal maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan sosialisasi program Raskin secara khusus, baik terhadap aparat/petugas dilapangan, keluarga miskin yang akan menerima dan masyarakat umum. Sehingga program Raskin dapat diketahui secara keseluruhan baik mekanisme pelaksanaannya, besarnya harga beras Raskin serta sampai pada unit pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan Raskin.
2. Perlunya data yang akurat dari pihak Rukun Tetangga yang bertugas mendata masyarakat diwilayahnya mengenai kepindahan dan kedatangan serta penduduk yang meninggal agar data yang dipakai sebagai acuan penentuan penerima Raskin akurat.
3. Pengawasan agar harus lebih diperketat lagi dan benar-benar melibatkan berbagai komponen masyarakat seperti perguruan tinggi, LSM (Lembaga SwadayaMasyarakat) dan lainnya, sehingga mempersempit peluang penyelewengan Raskin.
4. Sistem pelaporan dan evaluasi harus dilaksanakan dengan baik, sehingga jika ada berbagai kekeliruan dan kesalahan dapat dideteksi secara dini dan dapat dicarikan solusinya.
5. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Raskin, pemerintah harus membuka kotak pos pengaduan ditingkat Kelurahan sehingga masyarakat berani melaporkan kesalahan yang dilakukan oknum dalam penyaluran Raskin.
6. Semua ketentuan mengenai pelaksanaan program, seperti sosialisasi, penargetan sasaran penerima, monitoring dan evaluasi harus diatur secara jelas dan tegas dalam pedoman program.
7. Mengingat adanya sebagian masyarakat yang tidak memiliki uang untuk pembayaran beras pada periode pembayaran maka diharapkan pemerintah menyiapkan dana pinjaman pada masyarakat yang menerima beras benar-benar diberi jatah beras.
8. Kualitas beras yang dibagikan kepada masyarakat agar menjadi pertimbangan bagi pemerintah, dimana baiknya beras yang dibagi adalah beras kualitas bagus, tidak berbau dan layak konsumsi.

Daftar Pustaka

Ala, Andre Bayo, *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Liberty, Yogyakarta, 1981.

- Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Lok Bahu (Rino Tri Tana)
Anonim, *Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Direktur Utama Bulog No 25 Tahun 2003*, Bulog, Jakarta. 2003.
- Adbul,Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta:PT. Bumi Aksara.
- Asnawi, S. 1994. *Masalah Kemiskinan di Pedesaan dan Strategi Penanggulangannya, Seminar Sosial Budaya Mengentaskan Kemiskinan*. Kelompok Kerja Panitia Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan Provinsi TK.I. Sumatera Barat.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan publik* Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Moeleong, Lexy J, DR, Prof, 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Rosda. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sajogyo, Pudjiwati Sajogyo. 2002. *Sosiologi Pedesaan: Kumpulan Bacaan*. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.
- Sugiyono, Dr, Prof, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung : 2003.
- Suparlan, Supardi. 1995. *Kebudayaan, Kemiskinan, dalam Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropolog Perkotaan*. Yogyakarta. YOI.
- Usman, H. 2006. *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Widodo Joko, 2001, *Etika birokrasi dalam pelayanan publik*, CV CITRA MALANG
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Cetakan Kedua. Yogyakarta:Media Pressindo
- Dokumen - Dokumen :
- Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Bulog No. 25 tahun 2003. Jakarta : Bulog.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial menjadi leading sektor.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan.
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- Intruksi Presiden Nomor 3 tentang Kebijakan Perberasan. . Undang-Undang No.10 Tahun 2010 tetang APBN Tahun 2011, Ditetapkan subsidi pangan (Raskin 2011) dengan sasaran meliputi 7,48 juta RTS dan alokasi 1S kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga beras Rp.1.600 kg di 1 titik distribusi.
- Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulan Kemiskinan.
- Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.
- Kepmenko Kesra Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.
- Sumber Internet :
- jdih.surakarta.go.id/file/1022INPRES_NO_9_2002.PDF, 6 juni 2013
- <http://tangkapkorupsi.blogspot.com/2011/08/beras-raskin.html> , diakses tanggal 6 Juni 2013
- <http://tangkapkorupsi.blogspot.com/2011/08/beras-raskin.html> , diakses tanggal 6 Juni 2013

eJournal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2015 : 23 - 34
<http://tangkapkorupsi.blogspot.com/2011/08/beras-raskin.html> , diakses tanggal 6 Juni 2013
<http://www.bisnis.com/m/beras-raskin-penyaluran-di-kaltim-baru-capai-4494>, diakses tanggal 17 Juni 2013